

**KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PEMOHON
PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI DESA
BUNTOK BARU KECAMATAN TEWEH SELATAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

*Community's Socio Economic Conditions who Apply's for Land Ownership of
Forest Area in Buntok Baru Village, Subdistrict Tewehe Selatan
District Barito Utara*

Kartika Rakhmawati, Udiansyah, dan Hafizianor
Jurusan Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The number of poor people in Indonesia is still quite large, especially for residents whose livelihoods are based on agraria sources. People who want to manage forest land should have official management rights in order to support their economy. Therefore, the government through the Ministry of Environment and Forestry formulated a program for people's welfare, namely the Land Utilization Object of Agrarian Reform Program (TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)). The objective of this study was to examine the socio-economic conditions of the people applying for land ownership in the forest area and review the implementation of land tenure in the forest area. Data were analyzed using descriptive methods and qualitative methods. The results showed that the community consisted of the most productive age groups with the most male sexes and the most dominant livelihood as a farmer. Education level is moderate and 100% islamic religion. The community economy is still low because people's income is still below the poverty line. Most of the time managing land is <10 years and dominantly managed to become oil palm plantations. Social and cultural societies apply value and cultural norms in the form of mutual cooperation, mutual support, and mutual consultation with maximum length of stay is 20-30 years. Customs that are carried out are Manasai dance, bapapai, pakanan sahur lewu dayak, mitoni and wetonan.*

Keywords: *Conditions, social, economic; applicant; land tenure*

ABSTRAK. Jumlah penduduk miskin yang mata pencahariannya berdasarkan pada sumber-sumber agraria di Indonesia masih cukup besar. Masyarakat yang ingin mengelola lahan hutan seharusnya mempunyai hak kelola yang resmi agar dapat mendukung perekonomian mereka. Maka dari itu, pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan program untuk kesejahteraan masyarakat yaitu melalui program pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)). Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat pemohon penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok umur yang masih produktif dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak dan mata pencaharian yang paling dominan sebagai petani. Tingkat pendidikan berada dikategori Sedang dan agama 100% Islam. Ekonomi masyarakat masih rendah karena pendapatan masyarakat masih dibawah garis kemiskinan. Lama mengelola lahan sebagian besar <10 tahun dan dominan dikelola menjadi kebun sawit. Sosial budaya masyarakat menerapkan nilai dan norma budaya berupa gotong royong, rawangan, dan musyawarah bersama dengan lama tinggal paling banyak 20-30 tahun. Adat istiadat yang dilakukan yaitu tari Manasai, bapapai, pakanan sahur lewu Dayak, mitoni dan wetonan.

Kata Kunci: Kondisi, sosial; ekonomi; pemohon; lahan; penguasaan tanah

Penulis untuk korespondensi, surel: kartikarakhmawati13@gmail.com

PENDAHULUAN

Hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat tentunya memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Pengelolaan hutan bertujuan untuk melestarikan sumberdaya hutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Menurut Haryanto (2011), pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar hutan. Menurut Mulyani *et al.* (2011), keterikatan masyarakat Indonesia terhadap tanah masih sangat tinggi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar, khususnya bagi penduduk yang mata pencahariannya berdasarkan pada sumber-sumber agraria (*agrarian resource based*), seperti petani lahan/tanah sempit, buruh tani, dan produsen kecil lainnya.

Masyarakat di Desa Buntok Baru Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara secara umum memiliki latar belakang sebagai petani. Berdasarkan "Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, hutan yang ada di desa Buntok Baru memiliki status sebagai Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yaitu hutan yang ditetapkan untuk kepentingan pembangunan di luar bidang kehutanan". Banyak dari masyarakat tersebut yang menggarap dan memanfaatkan lahan yang masih berstatus kawasan hutan, salah satunya digunakan sebagai kegiatan pertanian.

Masyarakat yang ingin mengelola lahan hutan seharusnya mempunyai hak kelola yang resmi, tetapi pada kenyataannya tidak ada bukti dan kepastian yang kuat bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengelolanya sehingga dikemudian hari bisa terjadi sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Maka dari itu, pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merumuskan program untuk kesejahteraan rakyat salah satunya melalui Program Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). TORA adalah instrument yang sedang digunakan pemerintah untuk menjalankan redistribusi akibat ketimpangan penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah. TORA merupakan program kebijakan

pemerintah sebagai upaya penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (Kartodihardjo 2018).

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa mengajukan PTKH diantaranya yaitu tanah yang ingin dikuasai berupa permukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, lahan garapan, dan/atau hutan yang dikelola masyarakat hukum adat, lahan telah dikuasai lebih dari 20 tahun, memiliki KTP untuk perseorangan dan selain perseorangan memiliki legalitas instansi/badan sosial, atau keagamaan/masyarakat hukum adat, memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT), dan lainnya. Kriteria tersebut harus terpenuhi agar program ini tidak salah sasaran. Perlu diketahui bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut apakah memang sudah sesuai dan memenuhi syarat menjadi pemohon PTKH. Oleh karena itu peneliti tertarik dan merasa perlu dilakukan penelitian tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat pemohon PTKH sebelum masyarakat tersebut masing-masing memiliki tanah yang bersertifikat resmi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat pemohon penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Buntok Baru Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara. Pemilihan desa dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu desa yang menjadi lokasi diterapkannya Reforma Agraria. Waktu untuk melaksanakan penelitian yaitu selama 3 bulan (Februari-April 2019) yang meliputi persiapan, pengambilan data, pengolahan data, dan pembuatan laporan hasil penelitian. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Buntok Baru, dimana masyarakat tersebut merupakan pemohon PTKH. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Peta Lokasi untuk mengetahui daerah penelitian, Kuisisioner sebagai alat bantu wawancara dengan responden, Alat tulis menulis untuk mencatat data yang diperoleh selama penelitian dan Kamera sebagai alat dokumentasi penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi di lapangan dan pengisian kuisisioner oleh responden. Data sekunder didapatkan dari studi pustaka berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan permohonan PTKH.

Pengumpulan Data

Data primer berasal dari responden. Penarikan contoh data primer diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel untuk responden ditentukan dengan menggunakan *stratified random sampling* karena pemohon terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah sampel responden penelitian ditentukan menggunakan rumus slovin (Supriyanto & Iswandari 2017) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel (*number of samples*)
- N : Jumlah populasi (*total population*)
- e : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) 5%

Jumlah total pemohon di Desa Buntok baru sebanyak 52 orang yang terdiri dari 36 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Total responden berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin yaitu sebanyak 46 responden (33 responden laki-laki dan 13 responden perempuan).

Pengumpulan data sosial ekonomi masyarakat pemohon PTKH didapatkan melalui pengisian kuisisioner oleh responden. Data primer meliputi demografi, ekonomi rumah tangga dan ekonomi sumberdaya alam, dan sosial budaya. Data sekunder yang dikumpulkan yaitu dokumen-dokumen yang membahas terkait pelaksanaan permohonan PTKH.

Analisis Data

Analisis data untuk kondisi sosial ekonomi masyarakat pemohon PTKH

menggunakan analisis deskriptif. Sugiyono (2009) mengatakan bahwa analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Data pendapatan total rumah tangga menggunakan analisis persamaan pendapatan rumah tangga sebagai berikut (Sari *et al.* 2014):

$$P_{rt} = P_1 + P_2 + P_3 \dots \dots \dots$$

Keterangan:

- P_{rt} = Pendapatan rumah tangga
- P₁ = Pendapatan *on farm* (usaha tani, ternak, pekarangan, dan perikanan)
- P₂ = Pendapatan *off farm* (buruh tani)
- P₃ = Pendapatan di luar sektor pertanian (buruh bangunan, jasa, dll)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosial Ekonomi Masyarakat

Demografi

Pengisian kuisisioner dilakukan oleh seluruh responden, tetapi ada 11 orang responden yang bukan dari Desa Buntok Baru sehingga data-data yang digunakan hanya dari responden Desa Buntok Baru yang berjumlah 35 orang responden.

Kelompok Umur

Penggolongan kelas umur menurut Adalina *et al.* (2015) dibagi menjadi umur produktif muda (18-37 tahun), umur produktif tua (38-55 tahun) dan umur non produktif (>55 tahun). Kelompok umur dari 35 responden bervariasi dengan kisaran umur dari 21 tahun sampai dengan 70 tahun. Umur rata-rata responden yaitu 44 tahun. Sebagian besar responden tergolong usia produktif tua 17 orang (48,57%) sedangkan usia produktif muda 11 orang (31,43%) dan usia non produktif hanya 7 orang (20%). Produktivitas seseorang dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh umur. Seseorang berumur produktif dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi

daripada orang yang termasuk ke dalam umur non produktif. Hal ini menunjukkan responden yang berumur diantara 18-55 tahun masih sangat berpotensi untuk dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan masih memiliki semangat untuk berusaha agar dapat menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Putri & Setiawina (2013), jika umur seseorang telah melewati masa produktif maka produktivitasnya juga menurun. Hal ini berkaitan dengan kekuatan fisik seseorang untuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas dalam menggarap lahan yang mereka kelola. Umur produktif lebih siap untuk dapat menggarap lahan sendiri.

Jenis Kelamin

Mayoritas responden memiliki jenis kelamin laki-laki (74,29%). Responden perempuan hanya 9 orang (25,71%). Hampir semua kepala keluarga yang menanggung dan mencari nafkah untuk keluarga adalah laki-laki sehingga lebih banyak responden laki-laki daripada perempuan karena juga berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki yang telah menikah untuk menafkahi keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Laki-laki juga lebih produktif untuk menggarap lahan berhubungan dengan banyaknya responden yang berada pada umur produktif. Hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab kepala keluarga yang dominan bekerja adalah laki-laki sehingga yang mengelola lahan serta mengurus segala yang berkaitan dengan lahan termasuk untuk permohonan PTKH adalah kepala keluarga masing-masing.

Mata Pencaharian

Mata pencaharian dapat diartikan sebagai keseluruhan aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumberdaya alam. Masyarakat agraris umumnya mengutamakan mata pencahariannya dengan mengandalkan dari sektor pertanian. Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan (Ruang Guru 2018). Hasil penelitian menunjukkan jenis pekerjaan yang paling dominan yaitu petani dengan jumlah 31 responden (88,57%). Pekerjaan lainnya yaitu Karyawan Swasta 5,71%, PNS dan Wirausaha masing-masing 2,86%. Banyaknya pekerjaan sebagai petani menunjukkan bahwa masyarakat Desa

Buntok Baru merupakan masyarakat agraris yang sangat membutuhkan lahan untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena itu sangat tepat penyelesaian PTKH diterapkan untuk petani yang lahannya belum memiliki legalitas yang resmi. Tidak hanya memiliki pekerjaan utama, tetapi ada juga pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh beberapa responden. Tepatnya ada 8 responden (22,86%) yang memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan tersebut yaitu sebagai penjual sembako, membuka warung makan, menyadap karet, tukang bangunan dan lainnya. Pekerjaan sampingan sangat dibutuhkan bagi seseorang yang pekerjaan utamanya tidak mencukupi kebutuhan hidup sehingga kondisi ekonominya kurang apalagi jika sudah memiliki keluarga banyak keperluan yang harus tercukupi. Pekerjaan sampingan juga sangat membantu perekonomian karena dapat menambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari.

Tingkat Pendidikan dan Agama

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh responden yaitu agama islam 100%. tingkat pendidikan formal paling tinggi dengan persentase 51,43% berada dikategori Sedang yaitu SMP-SMA. Tingkat pendidikan dikategori Tinggi hanya 8,57%. Pendidikan formal yang berada dikategori Rendah berjumlah 14 responden dengan persentase 40% yang berarti hanya memiliki selisih 11,43% dengan tingkat pendidikan kategori Sedang. Hasil penelitian mengenai pendidikan non formal yaitu, tidak ada responden yang mendapatkan pendidikan non formal seperti pelatihan atau kursus. Ini menunjukkan bahwa pendidikan non formal responden bisa dikatakan masih rendah.

Menurut Basrowi dan Juariyah (2010), dalam meningkatkan pembangunan nasional pendidikan adalah hal yang sangat penting karena dalam pembangunan nasional itu diperlukan manusia-manusia yang berkualitas dalam segala hal. Tetapi, tidak semua orang dengan mudah bisa mendapatkan pendidikan. Hal ini dikarenakan ekonomi masyarakat sebagai salah satu penyebabnya Masyarakat yang ekonominya kurang akan sulit untuk mendapatkan pendidikan apalagi tingkat pendidikan yang tinggi, karena untuk mencapai tingkat pendidikan tersebut diperlukan biaya yang besar. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat selain

diakibatkan karena keterbatasan biaya, juga karena keterbatasan sarana di desa. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdapat di Desa Buntok Baru hanya ada 1 sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak ada sehingga jika ingin bersekolah ditingkat SMA harus ke ibukota kecamatan di Desa Trahean. Jarak yang ditempuh juga menjadi hambatan karena jarak desa Buntok Baru ke Desa Trahean berjarak sekitar 35,7 km.

Menurut Garsetiasih (2012), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah diperlukan upaya pemberdayaan, selain itu dari aspek penguasaan lahan juga diperlukan sehingga dilakukan pelaksanaan PTKH di Desa Buntok Baru untuk

mendukung kesejahteraan petani dan menghindari konflik yang kapan saja bisa terjadi. Pendidikan responden yang banyak dikategori Sedang menunjukkan bahwa responden dapat menerima adopsi inovasi lebih mudah. Adopsi inovasi memiliki arti sebagai penerapan atau penggunaan suatu ide, alat-alat, atau teknologi baru yang disampaikan berupa pesan komunikasi (lewat penyuluhan) (Khasanah 2008), dengan adanya adopsi inovasi masyarakat dapat lebih mudah menerima inovasi baru untuk meningkatkan hasil pertanian dan bisa mengurus lahan masing-masing terkait permohonan penyelesaian PTKH.

Ekonomi Rumah Tangga & Ekonomi Sumberdaya Alam

Jumlah Tanggungan Keluarga

Tabel 1. Klasifikasi Responden berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	0	5	14,28%
2	1	6	17%
3	2	12	34,29%
4	3	10	29%
5	>4	2	6%

Jumlah tanggungan keluarga berjumlah 2 orang memiliki persentase paling tinggi dengan jumlah responden 12 orang (34,29%) sedangkan jumlah tanggungan keluarga lebih dari 4 orang hanya 5,72%. Banyaknya jumlah tanggungan keluarga berpengaruh terhadap kebutuhan hidup yang meningkat Jumlah tanggungan keluarga tergolong kecil, yang berarti satu orang kepala keluarga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 orang anggota keluarganya. Banyaknya anggota keluarga berkaitan dengan tenaga kerja yang tersedia. Akan lebih baik jika anggota keluarganya dimanfaatkan dengan optimal agar dapat membantu meringankan beban kepala keluarga atau anggota keluarga lain yang bekerja. Banyaknya anggota keluarga dapat membantu pekerjaan kepala keluarga dalam menggarap lahan perkebunan sehingga dalam proses pengajuan permohonan penyelesaian PTKH pun dapat dibantu anggota keluarga.

Pendapatan

Pendapatan responden yang berada di angka 1-3 juta sebanyak 17 orang (48,57%), 4-5 juta 12 orang (34,29%), 6-7 juta 2 orang (5,71%) sedangkan pendapatan yang lebih dari 7 juta 4 orang (11,43%). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat di daerah penelitian mempunyai tingkat pendapatan yang tergolong rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat berkaitan dengan rendahnya pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka pekerjaan dan pendapatannya akan semakin layak dan meningkat. Meningkatkan pendapatan masyarakat harus didukung dengan meningkatkan pendidikan mereka (Putri & Setiawina 2013). Rendahnya pendapatan masyarakat berarti tingkat kesejahteraannya juga rendah. Menurut perhitungan pendapatan per kapita sesuai rumus yaitu jumlah total pendapatan responden dibagi dengan jumlah jiwa per kepala keluarga (Hafizianor 2002) hasilnya sebesar Rp. 1.423.809,52/tahun dengan

jumlah 105 jiwa setara dengan Rp. 118.650 per bulan. Jika dihitung untuk per hari hasilnya yaitu Rp. 3.955. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Buntok Baru masih berada dibawah garis kemiskinan karena garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Rp. 401.000 per bulannya atau setara 13 ribu per hari sedangkan untuk Standar Bank Dunia yaitu Rp. 27.000 per hari.

Lama Mengelola Lahan dan Pengelolaannya

Lamanya pengelolaan lahan berkaitan dengan persyaratan lahan yang dimohonkan untuk dikuasai yaitu lahan harus telah dikuasai lebih dari 20 tahun sesuai "Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan." Sesuai peraturan tersebut, sebagian besar responden tidak bisa mengajukan lahannya karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Lama mengelola lahan kurang dari 10 tahun ada 24 responden (69%) sedangkan lama mengelola lahan 10-20 tahun 11 orang (31,43%).

Responden kebanyakan mengelola lahannya kurang dari 20 tahun sehingga seharusnya lahan tersebut tidak bisa diajukan untuk dikuasai. Tetapi, jika memiliki surat bukti bahwa mereka membeli lahan tersebut dari orang lain yang memang sudah mengelola lahan tersebut lebih dari 20 tahun (dengan ditambah lama mengelola lahan dari si pemohon) maka lahan tersebut masuk kriteria sesuai peraturan dan dapat dimohonkan untuk dikuasai. Menurut pihak tim Inventarisasi dan Verifikasi (Inver), seluruh responden sudah memenuhi kriteria tersebut sehingga lahan yang ingin dikuasai persyaratannya dapat diterima. Mayoritas petani di Desa Buntok Baru mengelola lahannya sebagai kebun. Bahkan yang pekerjaan utamanya bukan petani pun mengelola lahannya menjadi kebun sawit atau karet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden paling banyak mengelola lahannya menjadi kebun sawit sebesar 85,71% (30 responden), selebihnya mengelola lahan menjadi kebun karet. Luas lahan kebun yang dimohonkan oleh responden rata-rata seluas 2 ha dengan luas paling besar yang dimohonkan yaitu 2,5 ha oleh satu orang responden.

Sosial Budaya

Lama Tinggal

Data penelitian menunjukkan mayoritas lama tinggal responden yaitu antara 20-30 tahun (85,71%) dengan rata-rata lama tinggal selama 24 tahun. Hampir seluruh responden merupakan pendatang yang berarti bukan penduduk asli Desa Buntok Baru. Tetapi, ada juga responden yang dari lahir tinggal di desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat migrasi penduduk sangat tinggi. Tingkat migrasi penduduk yang tinggi ini diduga karena pemerintah saat itu melaksanakan program Transmigrasi atau pemindahan penduduk ke luar pulau Jawa. Transmigrasi dilakukan karena adanya ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia yaitu terjadinya kelebihan penduduk di pulau Jawa dan kekurangan penduduk di luar Jawa. Sejak pemerintahan orde baru (1966) program transmigrasi disempurnakan dan diperluas sehinggatujuan utamanya adalah peningkatan taraf hidup, pengembangan daerah dan redistribusi penduduk (Badan Pusat Statistik 2010). Hal lain yang diduga menjadi faktor adanya pendatang di desa tersebut yaitu dikarenakan adanya ikatan pernikahan dengan masyarakat setempat.

Lama tinggal berhubungan dengan lama mengelola lahan. Ada kemungkinan banyak pendatang yang membeli lahan dari penduduk asli sehingga banyak dari penduduk asli yang membuka lahan baru di Kawasan hutan. Hal ini menyebabkan Kawasan hutan akan makin berkurang seiring berjalannya waktu sehingga diterapkanlah solusi yaitu dengan penyelesaian PTKH ini agar memberi kepastian kepemilikan lahan dan mengurangi pembukaan lahan baru di kawasan hutan.

Adat Istiadat

Adat istiadat di Desa Buntok Baru terdiri dari dua adat yaitu adat Dayak dan adat Jawa. Adat istiadat yang masih dilakukan meliputi Tari Manasai, Bapapai, Pakanan Sahur Lewu Dayak, Mitoni, dan Wetonan. Tari Manasai adalah tarian khas Dayak yang merupakan tarian penyambutan tamu biasa disebut sebagai tarian selamat datang. Tarian ini biasanya dilakukan ketika ada tamu terhormat yang datang ke desa. Menurut Nugraheni (2018), biasanya tari Manasai mengelilingi lunuk sangkai atau rangkaian dahan lunuk dan bendera merah

putih serta bendera bahalai yang diletakkan di tengah sebagai simbol kebulatan tekad dan semangat persatuan dan kesatuan menjunjung tinggi falsafah Huma Betang yaitu dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tarian diawali dengan penari berjalan pelan dari belakang panggung, kemudian berjalan melingkari properti yang telah ditumpuk di tengah-tengah panggung.

Menurut hasil penelitian dari beberapa responden mengatakan bahwa Bapapai merupakan suatu ritual berupa mandi kembang calon pengantin pada malam hari sebelum pengantin melaksanakan malam pertama dan harus dilakukan setelah akad nikah. Bapapai dilakukan dengan makna agar pengantin yang dimandikan bersih dari masa lalu dan siap untuk memulai hidup yang baru. Pakanan sahur lewu biasanya berupa pemberian sesajen kepada leluhur bagi Dayak Hindu Kaharingan, dan dilakukan satu tahun sekali setelah panen besar biasanya dilakukan pada bulan mei. Biasanya saat melaksanakan pakanan sahur lewu ini juga melibatkan tokoh atau kelompok agama lain dengan tujuan menjalin kebersamaan.

Mitoni dan wetonan merupakan adat yang dilakukan oleh orang Jawa. Menurut hasil penelitian, mitoni adalah upacara adat Jawa yang dilakukan terhadap ibu hamil yang usia kandungannya 7 bulan. Biasanya juga disebut mandi-mandi 7 bulanan atau ritual 7 bulanan. Upacara mitoni ini bermaksud agar dilancarkan proses kelahirannya, bayi dan ibunya sehat dan selamat. Wetonan dilakukan dengan tujuan mendo'akan si bayi supaya diberi keselamatan, kesehatan, kepintaran dan apapun yang dilakukannya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan.

Menurut Pradanta (2016), wetonan merupakan peringatan hari kelahiran yang bertujuan untuk "ngopahi sing momong" atau memberi upah kepada yang mengasuh dalam hitungan kelender Jawa. Biasanya jatuhnya setiap 35 hari sekali (selapan) yang juga bertujuan untuk wujud rasa syukur, melaksanakan tradisi, dan spiritualisme (kejawen). Adanya adat istiadat yang ditemukan dari kedua suku berarti telah terjadi akulturasi budaya yang kuat.

Proses Sosial

Proses sosial yang dilakukan oleh responden berupa penerapan nilai dan norma serta bentuk kerjasama yang sampai saat ini masih dilakukan. Nilai dan norma

budaya yang masih dilakukan masyarakat Desa Buntok Baru sesuai hasil penelitian yang didapatkan yaitu gotong royong dan rawangan. Gotong royong dilakukan masyarakat Desa Buntok Baru misalnya seperti ketika ada kerusakan di jalan, masyarakat akan bergotong royong untuk berusaha memperbaiki jalan tersebut. Rawangan berasal dari kata "rewang" yang berarti membantu. Rawangan ini biasanya kegiatan yang berupa para tetangga saling berkumpul mengeluarkan tenaga, bahkan materi di tempat hajatan tetangga mereka tersebut dengan maksud membantu pemilik atau pembuat hajatan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Buntok Baru berupa pelaksanaan musyawarah. Musyawarah tidak dilaksanakan dengan rutin tetapi dilakukan ketika ada suatu masalah dan butuh solusi untuk mengatasinya, mereka akan melaksanakan musyawarah tersebut. Contoh musyawarah yang dilakukan yaitu ketika melaksanakan rapat, melaksanakan pemilihan calon kepala desa, dan sebagainya. Proses sosial yang terjadi di masyarakat Desa Buntok Baru berkaitan dengan potensi konflik yang bisa terjadi. Semakin sering masyarakat saling berkomunikasi, saling bekerja sama maka semakin erat hubungan dan jika ada masalah apapun termasuk mengenai lahan yang dikuasai dapat diselesaikan secara damai sehingga dalam proses penyelesaian PTKH dapat dilakukan tanpa adanya konflik antar pemilik lahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini terlihat pada pendapatan masyarakat yang berada dibawah kemiskinan karena untuk per hari hanya Rp. 3.955 per orang sedangkan standar BPS 13 ribu rupiah per hari dan standar Bank Dunia 27 ribu rupiah per hari. Kondisi pendidikan masyarakat yang tidak pernah sama sekali mendapatkan pendidikan non formal, sedangkan pendidikan formal berada pada katagori Sedang (51,43%) tetapi berbeda tipis (selisih 11,43%) dengan kategori rendah yaitu pada tingkat SD sebesar 40%. Umur rata-rata berada pada usia produktif

walaupun tingkat pendapatan berada di bawah garis kemiskinan menurut BPS dan Bank Dunia sehingga dapat disimpulkan kondisi ekonomi masyarakat rendah dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga menjadi rendah. Nilai dan norma yang berlaku hanya sedikit dan adat istiadat juga jarang dilakukan tetapi bentuk kerjasama masyarakat masih terus dilakukan untuk menjalin silaturahmi. Melihat kondisi sosial ekonomi pemohon yang rendah berarti sangat tepat dilaksanakan penyelesaian PTKH di Desa Buntok Baru agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat terutama petani di desa tersebut.

Saran

Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan, mendukung, dan dapat meningkatkan pendidikan masyarakat dengan menambah sarana dan prasarana yang diperlukan tiap desa, memberikan sosialisasi dan pendidikan non formal bagi masyarakat desa. Peneliti mengharapkan agar pemerintah adil dalam membagikan lahan untuk dikelola sendiri maupun melalui perhutanan sosial. Lahan yang diajukan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y., Nurrochman R.D., Darusman, D. & Sundawati, L. 2015. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 12 (2): 105-118.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Tren atau Pola Migrasi dari Berbagai Sensus dan Survei*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Basrowi & Juariyah, S. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7 (1): 58-81.
- Garsetiasih, R. (2012). *Manajemen Konflik Konservasi Banteng (Bos javanicus d'Alton 1832) dengan Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Alas Purwo Jawa Timur*. Disertasi tidak diterbitkan. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Hafizianor. 2002. *Pengelolaan Dukung Ditinjau dari Perspektif Sosial-Ekonomi dan Lingkungan*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada.
- Haryanto, T.D. 2011. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam Sistem Agroforestry. *Jurnal Wacana Hukum*.
- Kartodihardjo, H. 2018. Selamatkan Tanah Reforma Agraria. *Tempo.co* 06 Februari 2019.
- Khasanah, W. 2008. *Hubungan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Petani dengan Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi Budidaya Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas L) Di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo*. Tesis tidak diterbitkan. Surakarta: Program Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
- Kemenko Perekonomian RI [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI]. 2018. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Kemenhut (Kementerian Kehutanan). 2012. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 529/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas ± 15.300.000 HA (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar) Sebagai Kawasan Hutan*. Jakarta: Kemenhut.
- Mulyani, L., Yogaswara, H., Manun, L., & Mardiana, R. 2011. *Strategi Pembaruan Agraria untuk Mengurangi Kemiskinan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan*. Jakarta: PT Gading Inti Prima.
- Nugraheni, E.Y. 2018. Makna tari Kinyah Mandau Hatue suku Dayak Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. *Jurnal BioKultur*, 7 (1): 35-53.

- Pradanta, S.W. 2016. *Kajian Nilai-Nilai Budaya Jawa dalam Tradisi Bancakan Weton di Kota Surakarta (Sebuah Kajian Symbolisme dalam Budaya Jawa)*. Tesis tidak diterbitkan. Solo: Program Pascasarjana Universitas Surakarta.
- Putri, A.D., & Setiawina, N.D. 2013. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin di Desa Bebandem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 2 (4): 173-180.
- Ruang Guru. 2018. 10 Mata Pencaharian Penduduk Indonesia. (www.ruangguru.co.id diakses 17 Juni 2019).
- Sari, D.K., Haryono, D. & Rosanti, N. 2014. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agribisnis* 2 (1): 64-70
- Supriyanto, W. & Iswandari, R. 2017. Kecenderungan Sivitas Akademika dalam Memilih Sumber Referensi untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 79-86.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA.